

BUKU REFERENSI

**KELEMBAGAAN AGRIBISNIS:
PENDEKATAN MODEL KONTRAK**

Disusun Oleh:
M. RONDHI, SP, MP, Ph.D
AHMAD FATIKHUL KHASAN, SP, MP

**UPT PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

KELEMBAGAAN AGRIBISNIS: PENDEKATAN MODEL KONTRAK

Penulis:

M. Rondhi, SP, MP, Ph.D

Ahmad Fatikhul Khasan, SP, MP

Layouter :

Risky Fahriza

Editor :

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc

ISBN: 978-623-6039-17-5

Penerbit:

UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Redaksi:

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 00319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor Tunggal:

UNEJ Press

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

PERSEMBAHAN

Penulis 1

Kupersembahkan buku ini untuk *special one*, Retno Susilowati, yang selalu menemani setiap dinamika perjalanan hidup. Juga buah cinta kami, Faris Maulana Azhar (kelas 7) dan Fahira Michiko Aruna (Kelas 1) yang selalu memberi inspirasi untuk terus berkarya.

Penulis 2

Untuk yang selalu mendampingi dan menginspirasi, Dini Kurnia Sisti, Muhammad Kasyif Al-Mahtum (yang lagi senang bermain) dan Muhammad Tahkikul Azmi (yang baru menghirup nafas di dunia).

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penulisan buku Kelembagaan Agribisnis: Pendekatan Kontrak. Buku ini berbeda dengan buku kelembagaan agribisnis yang sudah ada yang lebih memandang kelembagaan agribisnis dari sisi lembaga (organisasi). Buku ini hadir dalam mengisi kekosongan pada bagian hubungan antar pelaku ekonomi dalam mencapai tujuannya. Bagaimanapun, dalam upaya mencapai efisiensinya, satu pelaku bisnis memiliki insentif dalam berhubungan dengan pelaku bisnis lainnya. Meskipun demikian dalam buku ini juga menguraikan peran pemerintah dalam kelembagaan agribisnis.

Buku ini memberikan gambaran kelembagaan agribisnis dari sisi teori dan praktek yang diuraikan dalam lima bagian besar (1) pentingnya kelembagaan agribisnis (2) kelembagaan: pendekatan teori kontrak (formal dan informal), (3) Data dan analisis dalam penelitian kelembagaan, (4) Praktik kelembagaan agribisnis pada berbagai komoditas, (5) Isu penelitian kelembagaan ke depan.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian kelembagaan agribisnis yang telah dilakukan dari tahun 2017-2020. Sebagian besar buku ini merupakan ringkasan dari artikel ilmiah yang telah dipublikasikan penulis di beberapa jurnal baik jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi, dan juga beberapa tugas akhir mahasiswa S1 dan S2. Kelembagaan agribisnis dibedakan berdasarkan kelembagaan formal maupun informal. Beberapa contoh kelembagaan informal dalam buku ini dijelaskan dalam kelembagaan pengelolaan lahan dan kelembagaan pengelolaan ternak. Selanjutnya kelembagaan formal diuraikan dalam bentuk kemitraan antara petani mitra -perusahaan mitra. Beberapa contoh praktis kemitraan adalah kemitraan petani tebu dan pabrik gula di Jember dan Probolinggo, kelembagaan agribisnis tembakau di Jember, dan kelembagaan usahaternak di Jember, kelembagaan kentang di Bondowoso.

Buku ini menjelaskan teori kelembagaan yang dikembangkan pertama kali oleh R. Coase tahun 1937. Semenjak itu banyak teori yang mendukung Coase antara lain North, Williamson, Binswanger, Allan dan Lueck, Mac Donald, Bellamere, Penning dan Garcia, Vassalos dan Li. Teori tersebut menekankan pada hubungan antar pelaku usaha ekonomi dan faktor-faktor yang meliputinya.

Buku ini ditujukan untuk peneliti bidang agribisnis, mahasiswa agribisnis (S1&S2) yang mengambil yang fokus pada kelembagaan agribisnis dan juga mahasiswa yang sedang menmpuh tugas akhir. Untuk

memahami kelembagaan praktis pembaca dapat membaca bagian praktis (bab 5-8). Untuk memahami teori kelembagaan, pembaca dapat melihat pada bab dua-empat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penulisan (penyelesaian) buku ini. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam penulisan dan publikasi: Eiga (2014), Hendrik (2014), Ad Hariyanto (2014), Devyana (2014), Kintani Sekarkundi (2015), Dimas brilliant (2015), Adinda Tissa (2015). Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih pada pihak yang telah membantu dalam pembuatan peta (sohibul Ulum) yang menggambarkan sebaran komoditas pertanian terpilih di Indonesia.

Terakhir, kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, maka mohon masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan.

Kebonsari, Oktober 2020

Penulis

Kata Pengantar

Bustanul Arifin **Kelembagaan Agribisnis: Meningkatkan efisiensi, Merajut** **Kesejahteraan**

Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mohammad Rondhi dan Bapak Ahmad Fatikhul Khasan, MP, penulis buku «Kelembagaan Agribisnis: Pendekatan Model Kontrak» yang memberi kesempatan untuk membaca draft awal dari buku ini. Tidak jarang kalangan awam memahami bahwa kelembagaan dimaksudkan sebagai organisasi atau perkumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Namun, dalam buku ini «Kelembagaan Agribisnis» diartikan dalam hubungan antar pelaku ekonomi untuk saling berinteraksi mencari insentif ekonomi.

Dalam bidang agribisnis, hal itu sering tergambarkan sebagai satu kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi perdesaan, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, dan lain-lain. Kelembagaan agribisnis bahkan sering disama-artikan dengan badan usaha milik desa (Bumdes) yang bergerak di bidang pertanian dan/atau badan usaha milik desa bersama (Bumdesma) jika meliputi suatu kawasan perdesaan, yang terdiri dari beberapa desa atau bahkan melintas kecamatan. Demikian pula, sejak periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kelembagaan agribisnis itu sering dicampur-adukkan dengan «korporasi petani dan nelayan» (KPN), yang memang telah dimasukkan ke dalam dokumen politik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024.

Dalam literatur ekonomi kelembagaan, definisi kelembagaan mencakup tiga demarkasi penting, yaitu: (1) norma dan konvensi (*norms and conventions*), (2) aturan main (*rules of the game*) dan (3) aturan kepemilikan (*property relations*). Daniel Bromley sering membahas tiga demarkasi tersebut, sambil mengikuti pemikiran pendahulunya seperti Richard Ely, John Commons dll. Definisi kelembagaan itu tentu sangat berbeda dengan defines kelembagaan sebagai suatu organisasi yang lebih banyak memberi batasan (*constrains*), bukan pembebasan (*liberty*) karena posisi atau status sosial seseorang yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi. Para penerima Hadiah Nobel Ekonomi seperti Richard North, Oliver Williamson dan bahkan Joseph Stiglitz justru lebih cenderung memperlakukan suatu organisasi sebagai kelembagaan, karena di dalam organisasi itu terdapat norma, konvensi, aturan main dan hukum lain yang tertulis.

Kelembagaan sebagai aturan main, biasanya ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak ditulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan juga dilihat sebagai sistem nilai yang dianut dan disepakati oleh suatu pranata sosial tertentu dan bahkan ditulis sebagai *code of conducts* untuk memberikan keleluasaan, sekaligus batasan bagi individu dan/atau bagi organisasi yang menanungi individu atau sekumpulan kepentingan tersebut. Penerima Nobel Ekonomi Kelembagaan Ronald Coase dan Elinor Ostrom cenderung memposisikan kelembagaan sebagai sistem nilai suatu masyarakat bisnis dan masyarakat sosial. Dalam konteks ini, kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang. Di sinilah kelembagaan diartikan sebagai seperangkat aturan main, sistem nilai atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (*a set of working rules of going concerns*), bahkan untuk mencapai tujuan bersama yang lebih universal.

Lietartur jalan tengah dari 2-3 kutub ekstrem di atas biasanya mengakomodasinya dalam memaknai aturan main yang (1) men-*define* suatu organisasi vs. organisasi lain yang ada dan (2) mempertegas struktur internal dari organisasi tadi. Aturan yang pertama lebih tegas terhadap aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti agar organisasi eksis dan tetap hidup, sedangkan aturan yang kedua lebih menekankan pada bagaimana pejabat atau pengurus organisasi diangkat, bagaimana laporan keuangan harus ditulis dan disampaikan, atau bagaimana suatu keputusan administratif dapat dibuat dan dipatuhi, dan sebagainya. Dalam istilah sehari-hari di Indonesia, kedua aturan main di atas berturut-turut dikenal sebagai (1) anggaran dasar, dan (2) anggaran rumah tangga, yang memiliki fungsi, tujuan dan cakupan yang berbeda. Setidaknya, dua jenis aturan tersebut ada yang bersifat lebih strategis (ke luar), tapi ada juga yang lebih taktis, tapi detail mempertegas struktur internal atau hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap individu (ke dalam).

Kembali pada kelembagaan agribisnis versi RPJM 2020-2024, “korporasi petani dan nelayan” (KPN) diperlakukan sebagai paradigma pembangunan yang terintegrasi dan meliputi banyak pelaku atau pengampu kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks ini, KPN dapat berupa suatu format kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani atau nelayan. KPN juga dapat berupa suatu sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, dari *on-farm* ke *off-farm* yang mampu menggerakkan perekonomian berbasis pertanian dan sumberdaya alam lain. Dalam konteks demikian, paradigma yang

dimaksudkan sebenarnya adalah upaya “korporatisasi” petani, perubahan pola pikir, manajemen bisnis, dan suatu sistem dan usaha agribisnis (SUA), sebagaimana telah dikenal luas sejak empat dekade terakhir, yang diharapkan dapat memberi arah bagi transformasi ekonomi nasional ke depan.

SUA adalah suatu kesatuan sekian subsistem dalam agribisnis yang utuh dan terintegrasi, mulai dari sub-sistem lahan dan input produksi di hulu, sub-sistem produksi di *on-farm*, aktivitas di luar usahatani (*off-farm*). Termasuk dalam paradigma SUA tersebut adalah rangkaian sub-sistem panen dan pascapanen, pengolahan hasil, sub-sistem pendukung seperti pemasaran, perdagangan dan distribusi, pembiayaan pertanian, penyuluhan pertanian, perubahan teknologi. Dukungan kebijakan pemerintah di tingkat ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, diplomasi ekonomi dan lain-lain juga merupakan determinan penting dari keberhasilan paradigma SUA.

RPJM 2020-2024 merencanakan program penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan dengan anggaran sebesar Rp 226,4 triliun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 200,9 triliun dan dari investasi sektor swasta sebesar Rp 25,5 triliun. Indikator keberhasilan yang dituliskan dalam RPJM, seperti biasa, terlalu ambisius. Misalnya, terjadi peningkatan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, yang sebenarnya merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indikator keberhasilan lainnya adalah peningkatan produktivitas komoditas 5 persen per tahun hingga tahun 2024. Target-target tersebut tentu tidak mudah untuk dicapai mengingat dampak Pandemi Covid19 yang sangat dahsyat, mengurangi dayabeli, menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, hingga Indonesia perlu bersiap menghadapi resesi ekonomi. Bahkan, target-target penerimaan negara dalam APBN 2020 sulit tercapai, hingga angka defisit diperkirakan membengkak menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Agribisnis sebagai sebuah sistem dan budaya baru mengelola pertanian dan basis sumberdaya alam lain sebenarnya “baru dikenal” di Indonesia sejak 1970an. Berhubung esensi utama suatu sistem dan usaha agribisnis sebagai keterkaitan seluruh komponen dan sub-sistem agribisnis, tentu tidak mudah untuk merumuskan suatu strategi pengembangan yang terintegrasi, apalagi dengan faktor eksternal yang sukar sekali dikendalikan. Para pelaku dan segenap pejuang agribisnis telah meyakini bahwa paradigma SUA itu sebagai suatu keniscayaan saja. Karakter utama komoditas agribisnis memang mengandung risiko dan ketidakpastian,

sehingga di sana terdapat peluang berharga untuk mengelola risiko dan tingkat ketidakpastian tersebut.

Buku kelembagaan Agribisnis yang ditulis oleh Mohammad Rondhi dan Akhmad Fatikhul Haan ini fokus pada kelembagaan kontrak yang dibuat antar pelaku bisnis pertanian, baik kontrak formal (tertulis) maupun kontrak nonformal (tidak tertulis). Buku ini menjadi pelengkap buku kelembagaan agribisnis yang sudah ada selama ini. Buku ini secara mendasar membahas isi kontrak antar pelaku bisnis dan insentif secara ekonomi yang melingkupi keduanya, dan faktor yang berpengaruh pada kontrak tersebut. Dalam buku ini kelembagaan agribisnis diartikan secara spesifik berdasarkan interaksi antar pelaku usaha dan lingkungan yang melingkupi interaksi tersebut seperti adanya kebijakan pemerintah, karakteristik usahatani (komoditas). Buku ini disarikan dari hasil penelitian penulis yang telah dilakukan dari tahun 2017-2020 pada berbagai komoditas pertanian antara lain komoditas pangan (padi), peternakan (ayam broiler dan sapi potong), hortikultura (kentang) dan komoditas perkebunan (tebu dan tembakau). Penulis secara lugas mengungkapkan kelembagaan informal dalam usaha tani padi yang dikenal dengan sistem “kedokan” dan dalam usaha ternak sapi potong yang dikenal dengan sistem “gaduhan”. Pembahasan difokuskan pada insentif ekonomi yang didapatkan oleh masing-masing-masing pelaku ekonomi dan alasan kenapa kelembagaan informal tersebut masih ada ditengah-tengah munculnya model kelembagaan lain seperti kelembagaan upah dan sewa.

Kelembagaan formal kontrak banyak diaplikasikan pada usahatani atau usahaternakan ayam broiler, kentang, tembakau, dan tebu yang menghubungkan antara petani (peternak) dengan perusahaan agribisnis. Penulis menjelaskan dua alasan penting kenapa kontrak pertanian secara formal (kemitraan) banyak diaplikasikan pada usahatani tersebut, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan input produksi dan jaminan pasar. Peternak ayam broiler memerlukan kemitraan karena kebutuhan mendapatkan input produksi seperti pakan ternak, bibit ayam (DOC), vaksin dan jaminan pasar ayam. Di sisi lain, perusahaan pakan ternak membutuhkan kemitraan dengan peternak dalam upaya untuk mendapatkan jaminan pasar produk pakan ternak, vaksin dan lainnya.

Penulis membagi kemitraan dalam dua jenis kemitraan (kontrak) yaitu kontrak produksi dan kontrak pasar mengacu pada literatur yang dikemukakan oleh Mac Donald, seorang ahli kelembagaan agribisnis dari USA. Petani berhak memilih bentuk kemitraan yang dipilih sesuai kemampuan finansial dan kondisi sosial ekonominya. Dalam kontrak produksi perusahaan memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana output

diproduksi (kuantitas dan kualitas), sedangkan dalam kemitraan pasar perusahaan lebih banyak mengatur bagaimana pasar tersebut diatur.

Pada bagian terakhir penulis menjelaskan pilihan petani untuk bermitra atau tidak bermitra dengan pendekatan statistik ekonometrik. Bagian ini sangat penting mengingat partisipasi petani dalam kemitraan masih tergolong rendah (rata-rata dibawah 10%) padahal manfaat kemitraan sangatlah besar. Pilihan petani dijelaskan dengan tiga faktor utama, yaitu faktor demografi petani (peternak), faktor karakteristik usahatani (komoditas), dan faktor persepsi petani. Penulis mengungkapkan dua variabel baru yang belum banyak digunakan oleh peneliti yaitu variabel preferensi risiko (*risk preference*), dan tingkat penolakan risiko (*risk aversion level*).

Tafsir penting atau implikasi keilmuan, manajerial dan kebijakan dalam mendalami kelembagaan agribisnis sebagaimana dijelaskan dalam buku ini adalah bahwa pengembangan kelembagaan agribisnis perlu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip rasa saling percaya (*trust level*) yang tinggi dan aktivitas usaha yang saling membutuhkan. Kelembagaan agribisnis yang maju dan berkembang pesat secara sosial-ekonomi menjadi akan mampu meningkatkan efisiensi dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi lain secara proposional.

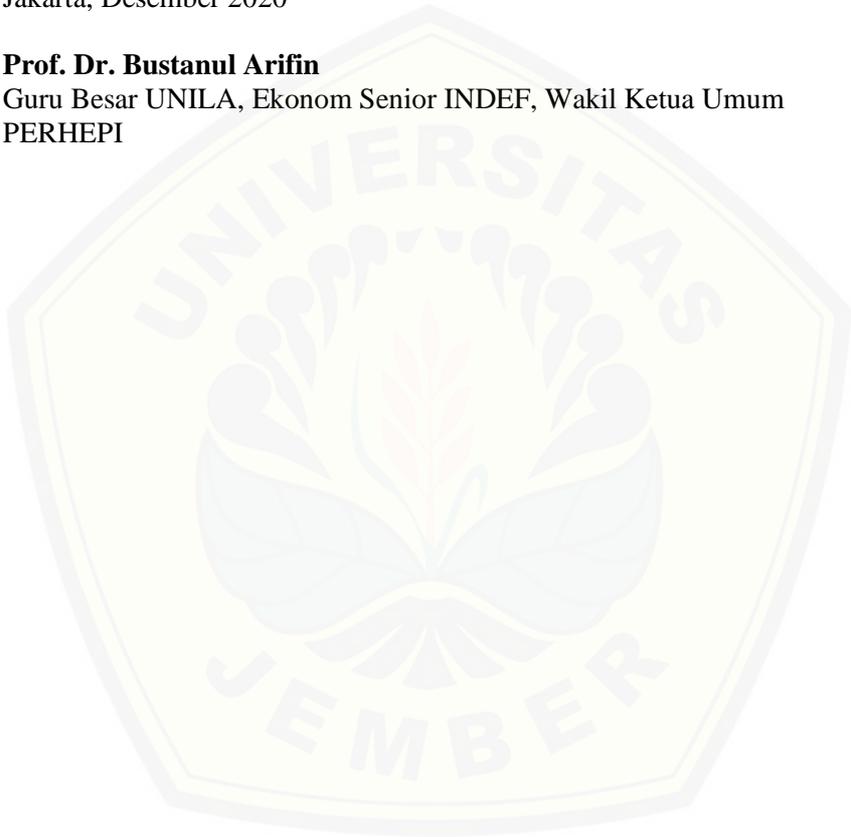
Kelembagaan agribisnis perlu senantiasa di-*govern* aturan main, payung hukum atau aransemen kelembagaan yang menjadi arah bagi pengembangan model bisnis yang efisien, termasuk skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders relevan. Pendampingan dan pemberdayaan unsur-unsur kelembagaan agribisnis, terutama petani kecil, peternak dan nelayan masih amat diperlukan, misalnya dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga akademik lain. Para pendamping atau organisasi lain yang terlibat tersebut diharapkan dapat meningkatkan jejaring dengan sektor perbankan, setidaknya dalam peningkatan jangkauan pembiayaan agribisnis. Demikian pula, pelibatan sektor usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan menjadi bapak angkat atau pengasuh dari kelembagaan agribisnis.

Siapa pun yang peduli terhadap pengembangan agribisnis, peningkatan efisiensi ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan petani perlu menjadi buku ini sebagai referensi atau rujukan yang bermanfaat. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi para peneliti, mahasiswa tingkat sarjana dan pascasarjana, dan bagi perumus kebijakan dan praktisi agribisnis dan/atau pendamping petani dan masyarakat.

Jakarta, Desember 2020

Prof. Dr. Bustanul Arifin

Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, Wakil Ketua Umum
PERHEPI



DAFTAR ISI

PRAKATA iii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI xii

Bagian 1 Pentingnya Kelembagaan Agribisnis dan Isu-isu

kelembagaan 1
1. Pentingnya Kelembagaan dalam Agribisnis 3
1.1 Pendahuluan 3
1.2 Kelembagaan dan Kelembagaan Agribisnis 5
1.3 Insentif 6
1.4. Biaya Transaksi 6
1.5. Sistem Kontrak 7
1.6. Peran Pemerintah 11
1.7. Struktur Buku 11
2. Isu-Isu Kelembagaan dalam Tahapan Produksi Pertanian 12
2.1 Pendahuluan 12
2.2 Tahapan-Tahapan dalam Usahatani 12
2.3 Pasar Spot (*Spot Market*), Kontrak (*Contract*), dan Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*). 14
2.4 Ekonomi Kelembagaan dalam Kontrak 19
2.5 Peran Kontrak dan Rantai Nilai Pertanian (*Agriculture Value Chain*) dalam Pembangunan Ekonomi 23

BAGIAN 2 Sistem Kontrak pada Pertanian 25

3. Sistem Kontrak Lahan dan Tenaga Kerja Bidang Pertanian 27
3.1 Definisi dan Insentif Kontrak 27
3.2 Model Dasar dalam Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan Tenaga Kerja 30
3.3 Penutup 34
4. Kontrak Produksi dan Pasar : Kelembagaan Kemitraan 35
4.1 Pendahuluan 35
4.2 Penyusunan Kontrak Produksi dan Pasar 36
4.3 Karakteristik Usahatani 39
4.4 Perilaku menghadapi Risiko (*Risk Attitude*) dan Tingkat Preferensi Resiko (*Risk Preference*). 41
4.5 Faktor Demografi 48

Bagian 3 Metode dalam Penelitian Kontrak	57
5. Data, Metodologi dan Alat Analisis dalam Penelitian Model Kontrak	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Data.....	60
5.3 Beberapa alat Analisis.....	61
Bagian 4 Praktek Kelembagaan dalam Bisnis Pertanian.....	65
6. Kelembagaan Informal Pengelolaan Usaha tani dan Usaha ternak	67
6.1 Kelembagaan “Kedokan” dalam Usaha tani padi.....	68
6.2 Kelembagaan informal “gaduhan” dalam pengelolaan usaha ternak Sapi	71
6.3 Kelembagaan informal dan Insentif ekonomi.....	73
7. Kelembagaan Formal (Kemitraan) Komoditas Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	75
7.1 Bentuk Kemitraan Usahatani Hortikultura	76
7.2 Kemitraan Usaha tani Perkebunan (Tebu dan Tembakau)	82
7.3 Kemitraan Usaha ternak Ayam Broiler	96
8. Determinan Pelaku Usahatani Mengikuti Kontrak	105
8.1 Faktor Demografi.....	106
8.2 Faktor Fisik (Karakteristik Usahatani) dan Ekonomi	108
8.3 Faktor Partisipasi dalam Lembaga	110
8.4 Faktor Persepsional	112
9. Utilitas Pelaku dalam Kelembagaan Agribisnis	115
9.1 Utilitas Petani dan Penedok dalam sistem Kedokan.....	115
9.2 Utilitas dalam sistem Gaduhan pada pengelolaan Ternak	117
9.3 Perbandingan Pendapatan Petani Mitra dan Non Mitra dalam Usahatani Tembakau.....	119
Bagian 5 Isu Penelitian Kelembagaan Agribisnis Ke Depan	123
10. Pelajaran dari Kelembagaan Agribisnis Model Kontrak dan Issue Penelitian Kelembagaan Agribisnis Ke Depan.....	125
10.1 Pelajaran dari Kelembagaan Agribisnis dari berbagai Model Kemitraan Komoditas Agribisnis.....	125
10.2 Isu-isu Penelitian Kelembagaan Agribisnis Ke Depan.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
GLOSSARIUM	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Level dan pelaku kelembagaan agribisnis, dimodifikasi dari (Williamson, 1996)).	5
Gambar 1. 2	Karakteristik kelembagaan dan kontrak agribisnis	8
Gambar 4. 1	Perilaku preference produsen	42
Gambar 4. 2	Hubungan perilaku menghadapi risiko (risk attitude) dan level preferensi risiko	46
Gambar 6. 1	Model pengelolaan lahan untuk usahatani padi	68
Gambar 6. 2	Insentif, kewajiban, hak, dan penanggungungan resiko bagi petani pemilik, dan pendedok.	69
Gambar 6. 3	Pengelolaan sapi model “gaduhan” baik untuk penggemukan maupun untuk anakan.....	72
Gambar 7. 1	Bentuk kemitraan petani-perusahaan	76
Gambar 7. 2	Alur kemitraan komoditas cabai merah	78
Gambar 7. 3	Alur kemitraan komoditas kentang	81
Gambar 7. 4	Lembaga yang terlibat dalam usahatani tebu – produksi gula.....	83
Gambar 7. 5	Distribusi komoditas tebu di Indonesia.....	84
Gambar 7. 6	Proses pengolahan tebu – gula kristal	87
Gambar 7. 7	Persebaran komoditas tembakau di Indonesia	92
Gambar 7. 8	Proses bisnis dalam industri tembakau	93
Gambar 7. 9	Persebaran komoditas ternak di Indonesia	96
Gambar 7. 10	Hubungan antar pelaku bisnis ayam broiler.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tahapan dan Tugas dalam Pertanian dan Pengambilan Keputusan.....	13
Tabel 2. 2	Tiga cara mentransfer produk dari petani ke pelaku ekonomi selanjutnya.....	15
Tabel 2. 3	Biaya transaksi yang muncul pada model kontrak dan pasar spot.....	22
Tabel 4. 1	Item-item pernyataan perilaku menghadapi risiko.....	45
Tabel 4. 2	Pengaruh usia petani terhadap partisipasi kemitraan	49
Tabel 4. 3	Pengaruh gender terhadap partisipasi kemitraan.....	51
Tabel 4. 4	Pengaruh pendidikan terhadap partisipasi kemitraan	53
Tabel 4. 5	Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap partisipasi kemitraan.....	55
Tabel 6. 1	Penggunaan tenaga kerja dalam keluarga untuk petani kedokan, sewa, petani milik sendiri.....	70
Tabel 6. 2	Insentif dan wewenang pelaku ekonomi dalam model “gaduhan”.....	72
Tabel 7. 1	Bagi hasil PG dan petani pada berbagai tingkatan rendemen.....	88
Tabel 7. 2	Ilustrasi penerimaan dan biaya giling pada rendemen dan produksi tertentu.....	88
Tabel 7. 3	Kewajiban pabrik gula dan petani	90
Tabel 7. 4	Kewajiban Perusahaan penyedia daun tembakau dan petani.....	94
Tabel 7. 5	Kualitas daun tembakau hasil produksi petani tembakau dan harga yang ditawarkan perusahaan	95
Tabel 7. 6	Kebutuhan jenis pakan berdasarkan umur ayam broiler	98
Tabel 8. 1	Kondisi demografis pelaku usahatani/usahata ternak terpilih	106
Tabel 8. 2	Pengaruh faktor demografi dalam keputusan kontrak.	107
Tabel 8. 3	Pengaruh faktor karakteristik usahatani dalam keputusan kontrak	109
Tabel 8. 4	Pengaruh faktor keikutsertaan lembaga pada keputusan kontrak	111

Tabel 8. 5	Pengaruh faktor persepsional dalam keputusan kontrak	113
Tabel 9. 1	Analisis pendapatan pada berbagai pengelolaan lahan usahatani padi	116
Tabel 9. 2	Biaya, penerimaan, dan keuntungan ekonomi pengelolaan sapi model gaduhan selama satu kali pemeliharaan (Rupiah)	118
Tabel 9. 3	Biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani tembakau petani mitra dan non-mitra.	120







Bagian 1

Pentingnya Kelembagaan Agribisnis dan Isu-isu kelembagaan

Bagian ini menguraikan alasan pentingnya pembahasan kelembagaan agribisnis dari sudut pandang pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Bagian ini terdiri dari 2 bab di mana bab1 menguraikan pentingnya kelembagaan agribisnis, dan bab 2 isu-isu kelembagaan yang penting dalam setiap tahapan pengusahaannya. Setelah memahami bagian ini pembaca dapat memahami sisi yang berbeda dalam memahami kelembagaan agribisnis.

- Engineering*, 113, 356–368. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.09.008>
- Wang, Xinhui, Guo, H. and Wang, Xianyu (2017). Supply chain contract mechanism under bilateral information asymmetry, *Computers and Industrial Engineering*, 113, pp. 356–368. doi: 10.1016/j.cie.2017.09.008.
- Williamson, O. E. (1996). *The Mechanism of Governance*. Oxford University Press.

